



RENJA

RENCANA KERJA DISKOMINFO
2023

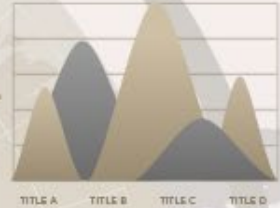
01

Anggaran
DISKOMINFO



02

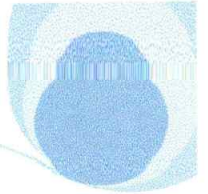
Realisasi
Anggaran



KOMINFO
KABUPATEN BOMBANA



DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BOMBANA



KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana Tahun 2023 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2023 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap Bidang dan Seksi serta usulan dari berbagai pihak. Renja 2023 ini merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra 2023-2026.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan PD yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun Anggaran 2023 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2023, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2023, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahun selanjutnya.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Kab. Bombana

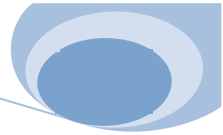


DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rensta Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	8
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	10
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	11
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	12
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	12
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	14
3.3 Program dan Kegiatan.....	15
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	18
BAB V PENUTUP.....	20
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

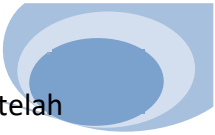
Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana tahun 2023 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra – PD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana tahun 2023 – 2026, dengan Mempedomani Rancangan Awal RKPD tahun 2022, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2004 – 2024. Renja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun – tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Proses penyusunan Rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana sesuai dengan Ketentuan Undang-undang mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2023-2026 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Rencana kerja Perangkat Daerah menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program Perangkat Daerah secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

Rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan.



Pada tahun 2023 ini merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Rencana kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Perangkat Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan yang ditetapkan. Dalam hal ini dilakukan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.


Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana Tahun 2023 antara lain:


1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RPD tahun berkenaan.
2. Program dalam rencana kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Renstra pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang dan program-program kegiatan yang diajukan oleh setiap bidang.
4. Program dan kegiatan dalam Rencana kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (Outcome) indikator kinerja keluaran (Output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023 mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor (1308)
 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/ Kota.

- 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).
 17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergis antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisisensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

- Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana tahun 2023;
- Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023;
- Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

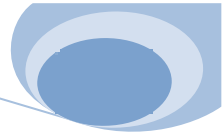
1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMINFO DAN STATISTIK TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah



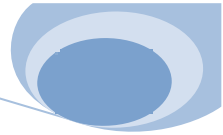
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP




BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMINFO DAN STATISTIK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Kominfo dan Statistik Tahun 2022

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana tahun lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini disajikan realisasi Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana Tahun 2022 dan realisasi Renja Tahun Berjalan sampai dengan Tahun 2022 dalam tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah (terlampir). Tabel TC. 29



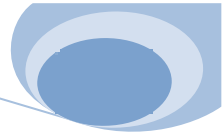
Secara umum, yang menjadi faktor penyebab untuk program dan kegiatan yang mencapai target adalah karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian besar kegiatan yang mencapai target adalah kegiatan yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.

Untuk program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 sampai dengan berakhirnya periode tahun anggaran atau awal tahun 2023 terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian target, yaitu:

1. Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan perdana Renstra periode 2023-2026 sehingga masih memerlukan berbagai macam penyesuaian pada masa awal tahun anggaran.
2. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Merupakan Dinas yang baru terbentuk pada tahun 2017 sehingga memerlukan pembenahan dan penyesuaian baik dari segi Sarana dan Prasarana maupun dari segi SDM yang ada;
3. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi);
4. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis;
5. Penetapan indikator sasaran strategis yang belum dilengkapi dengan ketersediaan sumber data, sehingga menyebabkan tidak terukurnya indikator tersebut;
6. Ketercapaian sasaran strategis perspektif stakeholder sangat tergantung dari dukungan institusi/lembaga terkait sehingga pelaksanaan tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana saja belum cukup untuk menjadikan realisasi capaian sasaran-sasaran tersebut sesuai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan institusi/lembaga terkait lainnya.

Dikarenakan terdapat beberapa program kegiatan yang hingga awal Tahun Anggaran 2023 tidak didukung oleh tersedianya anggaran yang memadai sehingga target capaian kegiatan tidak mencapai 100% dari yang direncanakan, sehingga berimplikasi terhadap tidak tercapainya target capaian Renstra PD 2023-2023 di awal tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:



1. Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2023 dan Renstra 2023-2026
2. Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan
3. Efisiensi alokasi belanja
4. Penambahan alokasi pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam bidang Komunikasi dan Informatika, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandiaan.


Penataan kelembagaan dan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 64) dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana dalam pencapaian visi, misi secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu - isu strategis. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik, namun pun demikian sebagaimana pada umumnya yang terjadi pada pelayanan Pemerintahan Daerah tetap mendapatkan atau menemui berbagai macam persoalan atau hambatan yang sangat krusial dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi. Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:


1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi yang masih belum menyentuh secara menyeluruh pada lapisan masyarakat utamanya bagi yang ada di wilayah perdesaan.

- 
2. Masih kurangnya sumberdaya manusia pada bidang teknologi informasi yang memiliki kompetensi yang memadai, baik pada lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bombana, lingkup OPD dan pada lingkup masyarakat desa.
 3. Belum optimalnya tingkat keterbukaan informasi publik secara menyeluruh pada wilayah Kabupaten Bombana.
 4. Pengelolaan sarana Komunikasi dan informasi baik berupa televisi maupun radio masih sangat terbatas baik dari jangkauan siaran maupun ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Berdasarkan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada upaya pencapaian optimalisasi pada pelayanan komunikasi dan informasi yang ada di wilayah Kabupaten Bombana. Adapun isu yang dapat dimunculkan untuk pembangunan pada tahun 2021 berdasarkan permasalahan yang dianggap krusial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi secara bertahap dan menyeluruh.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia informasi dan teknologi yang memiliki kompetensi yang tidak hanya dapat menggunakan akan tetapi juga mampu untuk merancang, melakukan evaluasi metode, dan memanfaatkan informasi dan teknologi beserta pendukungnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada.
3. Meningkatkan sistem layanan pemerintahan yang terintegrasi dan mampu menciptakan sistem teknologi informasi daerah yang telah disesuaikan dengan keberadaan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sekaligus sebagai wujud dari pelayanan prima pemerintah Kabupaten Bombana kepada masyarakat.
4. Pembentukan suatu kebijakan yang kuat dalam memberikan dukungan kepada pengimplementasian *e-Government* yang didasarkan kepada penguatan koordinasi secara kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan penyediaan aplikasi beserta perencanaannya yang dilakukan dengan penilaian secara berkala.
5. Pemanfaatan jaringan Internet untuk kepentingan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang diindikasikan dengan persentase peran sektor komunikasi dan informasi dalam meningkatkan PDRB, nilai investasi, dan peningkatan volume perdagangan hasil/produk asli kabupaten Bombana pada tahun 2023.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023.



Semenjak diberlakukannya Peraturan Bupati Bombana Nomor 39 Tahun 2016, maka bidang komunikasi dan informatika yang semula merupakan bidang pada Dinas Perhubungan berubah struktur organisasinya menjadi Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan serta memperhatikan masukan atau saran dari masyarakat, baik disampaikan secara langsung melalui Musrenbang, maupun secara tertulis.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bombana harus merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.


Bidang komunikasi dan informatika teramat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika akan berdampak secara signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informatika masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mengembangkan sektor komunikasi dan informatika dalam menghadapi pasar bebas dan persaingan global, sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan terus digalakkan.

Adapun Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Untuk mencapai visi tersebut maka Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai misi:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasikan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015— 2020, pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015—2020 akan fokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet dan digitalisasi siaran televisi.



Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing dan aman;
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Adapun tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dengan beberapa fungsi yang harus dijalankan sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana

Berdasarkan Rancangan Awal Renstra Dinas Kominfo 20 telah dirumuskan beberapa tujuan untuk rencana kerja Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Birokrasi Bidang Komunikasi dan Informasi;
2. Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan UU no.14 Tahun 2008;
3. Pengembangan penerapan e-government;
4. Peningkatan pemenuhan data statistik sektoral lingkup kabupaten;

5. Peningkatan pemanfaatan layanan persandian untuk pengamanan informasi.

Untuk mendapatkan fokus pada penyusunan program dan kegiatan, maka diperlukan suatu sasaran yang spesifik, terinci dan dapat dicapai dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hal tersebut maka sasaran untuk setiap Tujuan pada Renja ini, adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan birokrasi bidang komunikasi dan informasi
- 2) Mengembangkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU no, 14 Tahun 2008
- 3) Mengembangkan penerapan e-government;
- 4) Meningkatnya pemenuhan data statistik sektoral lingkup kabupaten.
- 5) Meningkatnya pemanfaatan layanan persandian untuk pengamanan informasi

3.3. Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan PD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan sasaran pembangunan bidang komunikasi dan informasi pada tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Sasaran I: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya



- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas
 - Pengadaan Meubel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
 - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - Pelayanan Informasi Publik
3. Program Aplikasi Informatika
 - a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah
 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - b. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah
 - Pengembangan Aplikasi Pengelolaan dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis diseminasi data sektoral
 - Membangun metadata statistik sektoral
5. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
 - Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah Daerah Kabupaten Kota

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini: Lampiran Tabel. TC. 33





BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

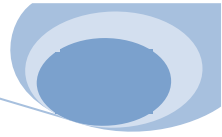
Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi dalam upaya menggali dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

BAB V
PENUTUP



Rencana Kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan PD yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis PD. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan PD.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana selama Tahun Anggaran 2023 dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin.

Dalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala yang terjadi, maka strategi pemecahan masalah yang digunakan di masa yang akan datang adalah:

- 1) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, dengan segala keterbatasannya serta sarana lain yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 2) Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat selain sosialisasi dan publikasi hasil pembangunan serta kebijakan Pemerintah Kabupaten bahwa pentingnya memiliki ijin-ijin, agar terwujudnya ketertiban umum, baik administrasi maupun non administrasi;
- 3) Melakukan pengawasan di lapangan serta mengadakan bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- 4) Mengoptimalkan tenaga teknis yang terampil di berbagai bidang multimedia.

Di samping itu untuk meminimalkan kendala yang dihadapi maka jalan yang akan ditempuh antara lain:

- a) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara efektif dan efisien;
- b) Menyusun dan melaksanakan seluruh jadwal kegiatan secara tepat;
- c) Secara bertahap mengadakan penyempurnaan strategi melaksanakan kegiatan;
- d) Menyempurnakan penyusunan anggaran agar teralokasi secara baik;
- e) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lebih intensif.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.



Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

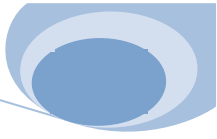
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik



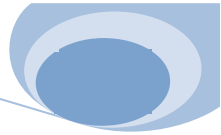
SOFIAN BACO, ST., M.PW

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19770909 200604 1 008



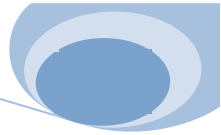
LAMPIRAN



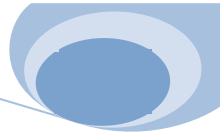
TABEL TC.29
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BOMBANA
TAHUN ANGGARAN 2022

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

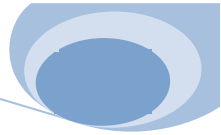
No	Uraian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2022		Realisasi Tahun 2022		Capaian	
				Vol	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	100%
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan administrasi perkantoran		1	4.407.629.848	1	4.322.490.720	100,00%	98,07%
2 16 1 2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun</i>		7	103.674.050	7	103.247.600	100,00%	99,59%
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang ditetapkan	Dokumen	1	22.000.000	1	21.998.100	100,00%	99,99%
2 16 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	41.235.500	1	41.175.300	100,00%	99,85%
2 16 01 2.01 03	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	4.867.500	1	4.850.500	100,00%	99,65%
2 16 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	1	2.331.000	1	2.331.000	100,00%	100,00%



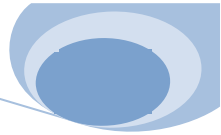
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA Perubahan SKPD	Dokumen	1	4.842.050	1	4.829.100	100,00%	99,73%
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan laporan hasil koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen	4	28.398.000	4	28.063.600	100,00%	98,82%
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan dokumen keuangan yang baik		1	2.531.447.198	0,968748131	2.452.334.743	96,87%	96,87%
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	2.347.263.998	1	2.268.306.145	100,00%	96,64%
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	125.792.500	1	125.790.000	100,00%	100,00%
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	25.513.200	4	25.512.800	100,00%	100,00%



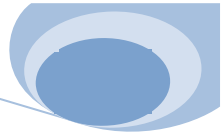
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	2	32.877.500	2	32.725.798	100,00%	99,54%
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan dokumen kepegawaian yang baik		1	21.000.000	1	21.000.000	100,00%	100,00%
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta Atribut kelengkapannya yang dibeli	Paket	1	21.000.000	1	21.000.000	100,00%	100,00%
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah		1	560.791.500	1	558.314.760	100,00%	99,56%
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	1	12.507.500	1	12.372.700	100,00%	98,92%
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	paket	1	51.605.000	1	51.162.000	100,00%	99,14%
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	paket	3	41.220.000	3	41.219.400	100,00%	100,00%
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	36	16.800.000	36	16.200.000	100,00%	96,43%
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	16.500.000	12	15.233.500	100,00%	92,32%



2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	422.159.000	36	422.127.160	100,00%	99,99%
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis dan jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang dibeli		1	826.362.200	1	825.658.400	100,00%	99,91%
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	jenis dan jumlah mebel yang dibeli	Paket	1	6.665.000	1	6.600.000	100,00%	99,02%
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	Paket	25	819.697.200	25	819.058.400	100,00%	99,92%
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			201.404.900		199.266.482		98,94%
2	16	01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	320.000	12	304.000	100,00%	95,00%
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	73.000.000	12	72.984.982	100,00%	99,98%
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	128.084.900	12	125.977.500	100,00%	98,35%
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah sesuai standar			162.950.000		162.668.735		99,83%
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	4	90.500.000	4	90.331.945	100,00%	99,81%
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	45	28.400.000	45	28.304.990	100,00%	99,67%



2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	44.050.000	1	44.031.800	100,00%	99,96%
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Kemitraan Komunitas dan Media Yang Aktif Dalam Pengelolaan Komunikasi Publik		1	790.999.800	1	759.816.138	100,00%	96,06%
2	16	02	2.01		<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</i>		1	790.999.800	1	759.816.138	100,00%	96,06%
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah aplikasi monitoring layanan informasi kepada masyarakat	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	100,00%	100,00%
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	15	780.999.800	14	749.816.138	93,33%	96,01%
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Kemitraan Komunitas dan Media Yang Aktif Dalam Pengelolaan Komunikasi Publik			1.952.097.750		1.899.358.900		97,30%
2	16	03	2.01		<i>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Cakupan Website Perangkat Daerah Yang memiliki Domain/Sub Domain Yang Terintegrasi dengan Domain Pemerintah Daerah.		1	1.094.804.000	1	1.047.708.040	100,00%	95,70%



2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang terhubung jaringan internet	OPD	9	1.094.804.000	9	1.047.708.040	100,00%	95,70%
2	16	03	2.02		<i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Aplikasi Yang Terintegrasi Dengan SPBE</i>			857.293.750		851.650.860		99,34%
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah data statistik yang terupdate	Dokumen	32	58.961.950	27	58.694.600	84,38%	99,55%
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah data statistik sektoral yang tersedia	Dokumen	32	51.037.950	27	46.748.000	84,38%	91,59%
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah OPD yang telah menggunakan email berbasis sandi	OPD	32	154.998.700	28	154.742.300	87,50%	99,83%
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah BTS yang diawasi	Unit	58	169.351.500	58	168.876.700	100,00%	99,72%
2	16	3	2.02	12	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	Dokumen	98	422.943.650	71	422.589.260	72,45%	99,92%
Jumlah									7.150.727.398		6.981.665.758		97,64%

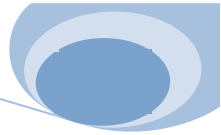


Tabel T-C.33

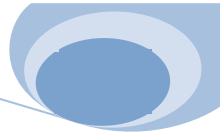
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2023
Kabupaten Bombana

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

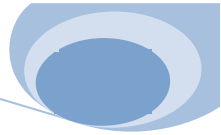
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) / Kegiatan (Out Put)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	6		7	8 = (7/6)	
	BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG				9.316.774.250	APBD	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	Kab. Bombana	100%	6.484.571.900	APBD	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun	Kab. Bombana	100%	67.098.200	APBD	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang ditetapkan	Kab. Bombana	1 Dokumen	3.162.000	APBD	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kab. Bombana	1 Dokumen	12.608.000	APBD	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kab. Bombana	1 Dokumen	1.807.700	APBD	



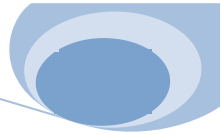
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kab. Bombana	1 Dokumen	1.855.100	APBD	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA Perubahan SKPD	Kab. Bombana	1 Dokumen	2.241.400	APBD	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan laporan hasil koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Bombana	4 Dokumen	45.424.000	APBD	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bombana	100%	2.310.185.600	APBD	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bombana	14 Kali	2.147.469.000	APBD	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bombana	100%	138.000.000	APBD	
3	Koord dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bombana	100%	12.548.600	APBD	
4	Koord dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Bombana	100%	12.168.000	APBD	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Kab. Bombana	100%	37.850.000	APBD	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bombana	3 Paket	37.850.000	APBD	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bombana	100%	718.470.200	APBD	
1	'Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bombana	1 Tahun	9.948.000	APBD	



2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Bombana	1 Tahun	48.576.200	APBD	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bombana	1 Tahun	115.737.000	APBD	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bombana	1 Tahun	9.600.000	APBD	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bombana	12 Bulan	17.100.000	APBD	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bombana	1 Tahun	517.509.000	APBD	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis dan jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang dibeli	Kab. Bombana	100%	2.832.867.900	APBD	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	jenis dan jumlah Kendaraan dinas yang dibeli	Kab. Bombana	2 unit	67.000.000	APBD	
2	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Kab. Bombana	4 paket	38.665.000	APBD	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Kab. Bombana	14 Paket	2.727.202.900	APBD	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bombana	100%	163.500.000	APBD	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bombana	12 Bulan	2.500.000	APBD	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bombana	12 Bulan	95.400.000	APBD	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bombana	12 Bulan	65.600.000	APBD	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Bombana	100%	354.600.000	APBD	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bombana	4 Unit	133.000.000	APBD	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bombana	45 unit	141.600.000	APBD	



3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bombana	1 Gedung	80.000.000	APBD	
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase Kemitraan Komunitas dan Media Yang Aktif Dalam Pengelolaan Komunikasi Publik	Kab. Bombana	100%	1.028.084.350	APBD	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan/Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bombana	100%	1.028.084.350	APBD	
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Bombana	100%	26.721.000	APBD	
2	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Kab. Bombana	100%	1.001.363.350	APBD	
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo	Kab. Bombana	100%	1.640.365.000	APBD	
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Website Perangkat Daerah Yang memiliki Domain/Sub Domain Yang Terintegrasi dengan Domain Pemerintah Daerah.	Kab. Bombana	100%	1.208.035.000	APBD	
1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Bombana	31 OPD	1.208.035.000	APBD	
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Aplikasi Yang Terintegrasi Dengan SPBE	Kab. Bombana	100%	432.330.000	APBD	
1	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Bombana	58 unit	280.530.000	APBD	
2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Bombana	98 Aplikasi	151.800.000	APBD	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Cakupan Pemenuhan Data Statistik Sektoral Lingkup Kabupaten/Kota	Kab. Bombana	100%	80.627.000	APBD	
1	Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan , Pengolahan Analisis Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang tersedia	Kab. Bombana	100%	51.295.000	APBD	



	2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah data statistik yang terupdate	Kab. Bombana	100%	29.332.000	APBD	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Layanan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kab. Bombana	100%	83.126.000	APBD	
	1	Penyediaan Layanan Kemanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah menggunakan TTD Elektronik	Kab. Bombana	100%	83.126.000	APBD	